

## Abstrak

Penerapan akuntansi aset tetap merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah karena sifat aset tetap yang material. Selain itu, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) tahun 2020, masih ditemukan beberapa entitas dengan pengelolaan aset tetap yang belum memadai. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap mengatur tentang pengelolaan aset tetap yang meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta penyajian dan pengungkapan. Objek penelitian ini yaitu Perwakilan BPKP Provinsi Bali yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan akuntansi aset tetap laporan keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Bali dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Dalam Menyusun penelitian ini, penulis mencari, mengumpulkan, membaca serta mempelajari berbagai bentuk teori serta peraturan mengenai akuntansi aset tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Bali telah melaksanakan pengelolaan aset tetapnya dengan tepat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

**Kata kunci:** aset tetap, pengelolaan aset tetap, akuntansi aset tetap, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, Perwakilan BPKP Provinsi Bali.

## Abstract

*The practice of fixed assets accounting is an important thing that must be considered by the government because fixed assets are material. In addition, based on the Summary of Semester I Examination Results (IHPS I) 2020, there were still some entities with inadequate fixed asset management. Statement of Government Accounting Standards (PSAP) No. 07 concerning Accounting for Fixed Assets regulates the management of fixed assets which include classification, recognition, measurement, depreciation, termination and disposal as well as presentation and disclosure. The object of this research is BPKP Representative of Bali Province which aims to determine the suitability between the practice of fixed asset accounting for the BPKP Representative Bali Province's financial statements with applicable standards and regulations. In compiling this research, the authors seek, collect, read, and study various forms of theories and regulations regarding fixed asset accounting. The results showed that the BPKP Representative of Bali Province had carried out their fixed asset management appropriately and in accordance with the applicable regulations, namely Statement of Government Accounting Standards (PSAP) No. 07 concerning Fixed Asset Accounting.*

**Keywords:** *fixed assets, fixed asset management, fixed asset accounting, Statement of Government Accounting Standards, BPKP Representative of Bali Province.*